

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan pokok yang menghantui perempuan dan anak di dunia termasuk Asia Timur yang meliputi Jepang dan Tiongkok. Selain itu negara Jepang dan Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling padat penduduknya dengan menghadapi tantangan sosial yang sangat besar termasuk ketidaksetaraan gender yang melebar, kekerasan seksual serta kasus diskriminasi gender. Hal ini tentu saja tidak jauh dari kegiatan yang cenderung berfokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan reproduksi, dengan meliputi keluarga berencana dan melahirkan anak. Hal ini dapat terjadi karena di Jepang dan Tiongkok karena masyarakat telah didominasi patriarki. Norma budaya yang berlaku di Jepang dan Tiongkok mempererat posisi subordinat perempuan secara sosial dan ekonomi. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jepang dan Tiongkok ini tidak hanya menyerang secara fisik akan tetapi secara psikologis.

Beberapa isu yang terjadi di Jepang termasuk kesenjangan upah dan kesulitan perempuan untuk bisa naik dalam dunia bisnis maupun posisi kepemimpinan. Begitu juga di Tiongkok juga mengalami isu dalam kesenjangan upah dan prospek karir yang rendah bagi perempuan serta kurangnya dukungan untuk kesetaraan gender bagi masyarakat sipil. Kesenjangan upah antara pria dan wanita di Jepang masih merupakan isu yang signifikan dalam ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan ini juga terjadi dalam bidang ekonomi serta ketenaga kerjaan dimana masih terdapat kesenjangan upah yang besar antara perempuan dan laki-laki yaitu sebesar 24,5% per tahun 2018 menurut laporan yang dirilis oleh OECD (Sari, 2020). Selain ketidaksetaraan gender dibidang ekonomi adapula ketidaksetaraan gender di bidang yang lain yakni Politik. Jepang memiliki tingkat partisipasi politik yang lumayan rendah Jepang berada di tingkat 118 dan peringkat 103 untuk kategori sub index partisipasi politik di Jepang berada di tingkat 144 kemudian partisipasi dalam dunia politik, Jepang masih cenderung rendah dengan 9 untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan jumlah 91 per 100 populasi (2016). Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang tidak hanya pada aspek ekonomi dan politik saja melainkan pada aspek pendidikan juga. Dalam aspek

pendidikan tercatat pada tingkat 76 sebagai aspek terendah. Untuk kategori sub index Jepang telah masuk dalam rangking 100 besar yaitu berada di angka 91 (We Forum Org, 2016). Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang dalam aspek pendidikan ini dapat dilihat dari adanya ketidaksetaraan di universitas yakni adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak universitas untuk menekan angka diterimanya perempuan sebagai peserta didik baru seperti yang terjadi di Universitas Medis (Sturmer, 2018). Seperti yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya, selain adanya ketidaksetaraan gender bagi perempuan di Jepang dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan. Maka terdapat ketidaksetaraan gender dalam aspek sosial seperti para perempuan yang menghadapi diskriminasi terhadap pekerja perempuan di tempat kerja, khususnya pada perempuan hamil dan setelah melahirkan anak pertamanya peristiwa ini disebut sebagai peristiwa "Matahara" (Matahara Net Org).

Sedangkan di Tiongkok Sepanjang tahun 1980-an, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tinggi, rata-rata sekitar 80%. Namun, pada tahun 2018, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah turun menjadi 68,6%, hanya sedikit lebih tinggi dari Amerika Serikat (66,1%) dan hampir sama dengan Jepang (68,7%) selain itu Pembangunan Tiongkok juga secara tidak proporsional menguntungkan pria. Kesenjangan pendapatan antara pekerja pria dan perempuan di perkotaan meningkat dari 15% pada tahun 1990 menjadi 25% pada tahun 2000. Ketimpangan ini telah bertahan selama dua dekade terakhir. Sebuah jajak pendapat pada tahun 2018 melaporkan bahwa rata-rata perempuan Tiongkok menerima penghasilan yang 22% lebih rendah daripada rekan kerja pria mereka (UN WOMEN ASIA PACIFIC ORGANIZATION, 2015). Begitupun dari segi aspek politik, perempuan di Tiongkok menghadapi tingkat keterwakilan yang relatif rendah. WEF menempatkan Tiongkok di peringkat ke-78 untuk perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik, di bawah India dengan berkependudukan yang sama yakni ke-19, tetapi di atas Amerika Serikat pada peringkat ke-98. Adapun ketidaksetaraan gender pada aspek pendidikan di Tiongkok seperti yang terjadi pada tahun 2018, rasio gender laki-laki selalu berpihak pada laki-laki. Dapat dilihat dari rasio perempuan terhadap laki-laki di Universitas Peking adalah 48 dari 52, sedangkan rasio di Universitas Tsinghua lebih rendah yaitu 34 dari 66. Di sisi lain, siswa perempuan lebih cenderung belajar di luar negeri dibandingkan dengan siswa laki-laki. Dalam aspek ekonomi ketidaksetaraan gender di Tiongkok juga masih

terjadi. Dalam aspek ekonomi seperti pada tahun 1990-an Penataan kembali perusahaan milik negara Tiongkok telah mempunyai konsekuensi yang sangat negatif bagi perempuan. Meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, proses privatisasi telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para pekerja berketerampilan rendah dan kerap kali terjadi oleh pekerja perempuan. Pembangunan Tiongkok juga menguntungkan laki-laki secara tidak proporsional.

Berkaitan ketidakadilan terhadap perempuan di Asia Timur tersebut tentu saja mendapatkan perhatian karena adanya isu tidak adanya keadilan terhadap perempuan yang bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini menjadi pengaruh terhadap tingginya permasalahan kasus dimana latar belakang terjadinya kekerasan dan tidak adanya keadilan terhadap perempuan karena adanya kesenjangan sosial dan kondisi politik yang tidak merata sehingga pemerintah tidak fokus terhadap kebijakan permasalahan Kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini tentu saja terjadi adanya pergerakan sosial untuk menanggulangi atas permasalahan ini yang dilakukan oleh *UN Women* dengan menggunakan kampanye *HeForShe* untuk menjadikan laki-laki sebagai agen perubahan untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender serta permasalahan pada ketidakadilan oleh perempuan di Asia Timur yang meliputi Jepang dan Tiongkok.

Dalam kasus ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang dan Tiongkok ini menjadi perhatian publik. *HeForShe* sebagai bagian dari solusi atas adanya isu ketidaksetaraan gender yang telah terjadi terutama di Jepang dan Tiongkok. Yang dimana dalam hal ini *HeForShe* memiliki peran untuk mengajak partisipan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan gender, maka dari situlah dapat dipahami bahwa kesetaraan gender dalam konsep gender ini bukan hanya mengacu pada perempuan saja melainkan laki-laki juga ikut berperan serta dalam segala upaya kesetaraan gender. Dan dari adanya program *HeForShe* ini perempuan telah mendapatkan dukungan serta dampingan oleh para partisipan laki-laki dan tidak adanya ketimpangan gender antara laki-laki maupun perempuan dalam segala aspek (Thesa, 2021)

Oleh karena itu gerakan sosial secara global yakni *HeForShe Campaign* ini tentunya memiliki peran penting terhadap kedua negara tersebut. Di Jepang *HeForShe* campaign ini dilakukan lewat berbagai macam cara seperti acara dan seminar, kampanye media sosial dan kolaborasi dengan perusahaan dan organisasi

lokal. Pada tahun 2017, *HeForShe* juga meluncurkan program "*HeForShe Impact Champion*" yang dimana Shinzo Abe sebagai perwakilan dari negara Jepang menjadi salah satu dari 10 Kepala Negara yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dalam upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja. Begitu pula di Tiongkok *HeForShe campaign* ini diluncurkan pada tahun 2015 di Universitas Tsinghua, dan sejak itu, perusahaan-perusahaan di Tiongkok telah melaksanakan komitmen *HeForShe*, seperti memberikan pelatihan kepada lebih dari 8.000 karyawan di Tiongkok dan negara lain serta mempromosikan kesetaraan gender di Tiongkok. *HeForShe* ini menyediakan pendekatan sistematis dan platform yang ditujukan agar *audiens* global dapat terlibat dan menjadi agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender (UN WOMEN ASIA PACIFIC ORGANIZATION, 2015).

Dengan melihat banyaknya kesetaraan gender dan kekerasan yang dialami oleh perempuan serta banyak terjadi diberbagai wilayah merupakan suatu hal yang menarik perhatian peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih Asia Timur yakni Jepang dan Tiongkok sebagai negara dalam objek penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai kasus ketidaksetaraan gender dan strategi yang digunakan oleh gerakan sosial yakni *HeForShe Campaign* karena kedua negara tersebut yang meliputi negara Jepang dan Tiongkok yang dimana kedua negara ini termasuk peringkat tinggi dalam kasus ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Dari sini juga terdapat hal menarik lainnya seperti adanya peran dari kampanye *HeForShe* atau dalam pengertiannya merupakan sebuah kampanye global dimana laki-laki dapat terlibat sebagai agen perubahan dalam pencapaian kesetaraan gender. Namun perlu diingat bahwa kampanye ini hanyalah satu bagian dari upaya yang lebih besar dalam memerangi ketidaksetaraan gender. Kedua negara tersebut masih perlu melakukan upaya konkret untuk mengatasi masalah diskriminasi gender, seperti dengan meningkatkan akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan yang setara, serta menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memfokuskan pertanyaan penelitian tentang Bagaimana Peran *HeForShe Campaign* dalam mendorong kesetaraan Gender di Jepang dan di Tiongkok?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan peran *HeForShe* dalam

mendorong Ketidaksetaraan gender di Jepang dan Tiongkok.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan suatu gerakan yakni HeForShe dalam mendorong ketidaksetaraan gender di Jepang dan Tiongkok, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya dalam memperkaya khasanah ilmu dalam kajian Hubungan Internasional.

1.5. Sistematika BAB

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis akan membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 bab yaitu:

BAB I yang akan berisi pendahuluan, yang mana berisi latar belakang masalah terkait Peran perbandingan HeForShe Campaign di Jepang dan Tiongkok, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

BAB II yang merupakan tinjauan pustaka, yang mana berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III yang merupakan metode penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknik analisa data serta variable penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian

BAB IV yang merupakan hasil dan pembahasan yaitu pertama, *UN Women* sebagai organisasi internasional perlindungan perempuan yang dimana memiliki sebuah program/gerakan yakni *HeForShe* dalam menyelesaikan ketidaksetaraan, faktor penyebab dan dampak kekerasan terhadap perempuan lalu upaya yang dilakkan pemerintah Jepang dan Tiongkok dalam menangani isu tersebut. Kedua, kekerasan terhadap perempuan di Jepang dan Tiongkok dimana dalam hal ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah Jepang dan Tiongkok kemudian menjelaskan mengenai kampanye dan program anti kekerasan. Ketiga, upaya *HeForShe* dalam membantu untuk mendorong ketidaksetaraan gender di Jepang dan Tiongkok.

Bab V yang merupakan bagian kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Ini akan mencakup kesimpulan dan rangkuman mengenai perbandingan peran

HeForShe campaign di Jepang dan Tiongkok dalam menghadapi segala bentuk ketidaksetaraan gender yang telah diajukan, saran yang telah diberikan, kemudian penelitian lanjutan yang dianggap penting untuk dijalankan atau dikembangkan.

